



Organisasi
Perburuhan
Internasional
Jakarta

Indonesia:
Terbebas dari
Kemiskinan



**Menghapuskan
Bentuk-bentuk Terburuk
Pekerja Anak**

8

Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan teknis singkat (*Technical Briefing Notes-TBNs*) telah disusun untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, sebagai dokumen latar belakang tentang persoalan dan pilihan-pilihan kebijakan kunci yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai pondasi dalam penyusunan laporan komprehensif: "*Terbebas dari Kemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia*".

Paparan teknis ini membahas: **Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak**. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi:

- Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral
- Desentralisasi dan Pekerjaan yang Layak: Mengaitkannya dengan MDGs;
- Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah dan Ekonomi Lokal);
- Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan;
- Pembangunan Pedesaan: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan;
- Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan;
- Mempromosikan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;
- Perlindungan Sosial bagi Semua;
- Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik di Pasar Kerja dengan memperkuat Tripartisme dan Dialog Sosial;
- Migrasi: Peluang dan Tantangan bagi Pengentasan Kemiskinan.
- Jender dan Kemiskinan

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ILO

*Seri Rekomendasi Kebijakan:
Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2004*

ISBN 92 2 015540 0

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersial juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutkan suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersial juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama atau melalui kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns; www.un.or.id/ilo, www.ilo-jakarta.or.id

Dicetak di Jakarta, Indonesia

MENGHAPUSKAN BENTUK-BENTUK TERBURUK PEKERJA ANAK

Pendahuluan

Di suatu dunia yang sempurna, tak seorangpun yang bisa membantah hak seorang anak untuk menikmati masa kanak-kanaknya, memperoleh pendidikan, perlindungan, kasih sayang dan waktu untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Namun pada kenyataannya, ada lebih dari 1,5 juta anak-anak berusia antara 10 sampai 14 tahun yang menjadi pekerja di Indonesia. Anak-anak itu terpaksa melepas hak-hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanaknya.

Dalam banyak kasus, kemiskinanlah yang menyebabkan pekerja anak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Dan, kemiskinan jugalah yang menggiring pekerja anak ke suatu titik dimana mereka nantinya juga akan melahirkan generasi baru yang sama atau mungkin lebih miskin dari mereka. Tanpa masa kanak-kanak, pada masa ketika dasar-dasar kemampuan manusia dikembangkan, tak dapat diingkari lagi ada lebih 1,5 juta anak-anak yang memiliki kemampuan terbatas untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan juga pilihan yang terbatas untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dimana pekerja anak merupakan perantara aktif yang menyebabkan lingkaran setan kemiskinan tetap lestari, sekaligus menyebabkan kemampuan nasional untuk memerangi kemiskinan secara keseluruhan terus menurun.

Kehadiran pekerja anak ini merupakan akibat dari pembangunan sosial ekonomi yang tidak

memadai dan tidak layak. Dan problema ini tidak dapat diselesaikan secara efektif jika tetap dipisahkan dari proses pembangunan yang lebih luas.¹ Dalam hal ini Indonesia cukup peka dan tanggap. Program Pembangunan Nasional Lima Tahunan (PROPENAS) yang sedang berjalan, 2000-2004, mengakui ada banyak permasalahan menyangkut pekerja anak. Hal ini mengacu pada konteks kebutuhan untuk memperkuat peraturan dan undang-undang tentang tenaga kerja yang masuk dalam kategori "anak-anak yang tidak punya pilihan lain, selain bekerja" Pengakuan tentang adanya pekerja anak dalam konteks pembangunan nasional merupakan langkah pertama menuju upaya mengurai dan memisahkan hubungan yang kait-mengait dan sangat erat antara pekerja anak dan kemiskinan.

Menempatkan masalah pekerja anak menjadi bagian utama dalam konteks pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan secara keseluruhan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas dan keterkaitan tindakan yang diambil dalam soal pekerja anak, tapi juga akan menimbulkan efek ganda. Hal semacam ini bisa memobilisasi para aktor yang berbeda untuk memberikan dukungan multidimensi yang dapat mengatasi akar penyebab munculnya pekerja anak, seperti kemiskinan. Dengan melakukan upaya seperti itu, kesempatan untuk menjangkau lebih banyak anak bisa menjadi semakin terbuka dibandingkan dengan yang mampu dijangkau tindakan-tindakan yang hanya dikhususkan untuk pekerja anak. Dukungan para pelaku yang berbeda yang bersifat multidimensi dan komprehensif juga memungkinkan direalisasikannya zona bebas pekerja anak.

Statistik Pekerja Anak

2

Di Indonesia, pekerja anak merupakan fenomena yang umum dan telah lama masuk dalam data nasional dengan nama "tenaga kerja anak". Karena usia minimum anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun (Undang-undang No. 20/1999), fokus tulisan ini diberikan pada anak-anak berusia 10-14 tahun. Berdasarkan tiga survei

1 Aksi-aksi utama untuk memerangi masalah pekerja anak dalam pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan, Hamid Tabatabai, ILO-IPEC, Juni 2003, halaman 2.

nasional berbeda, diperkirakan jumlah anak-anak berusia 10-14 tahun yang bekerja sebagai pekerja mencapai 1.575.000 (7,5 persen).² Juga perlu dicatat bahwa 26,1% dari pekerja anak adalah mereka yang berusia 15-17 tahun³. Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan bentuk pekerjaan lain yang lebih buruk menuntut perhatian khusus dan penanganan yang bersifat segera.

Anak-anak bekerja di berbagai sektor dan bentuk pekerjaan. Namun sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian keluarga dan di perusahaan manufaktur serta perdagangan skala kecil. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 telah mengubah struktur pekerja anak. Akibat perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja setelah krisis, terjadi informalisasi pekerja anak, jumlah anak yang bekerja di sektor pertanian berlipat ganda, dan menurunnya upah riil.⁴ Lebih jauh lagi, pekerja anak di perkotaan meningkat tajam. Semua itu mencerminkan adanya gelombang pekerja anak yang memasuki sektor informal.⁵ Krisis ekonomi tampaknya telah pula menyebabkan semakin banyaknya anak-anak bekerja pada pekerjaan yang tidak menyenangkan, yang tidak diatur dengan jelas, tidak terlindungi dan tidak formal dan kondisi tersebut lebih buruk dibandingkan sebelum krisis ekonomi.

Sementara itu, dunia internasional mulai memberikan perhatian khusus terhadap bentuk terburuk dan sifat pekerja anak. Sebagai negara yang pertama kali menandatangani Konvensi ILO 182 (tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak), pada 2002 Indonesia telah menetapkan satu langkah yang signifikan ke arah penghapusan

2 Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) pada 2001 memperkirakan jumlah tenaga kerja yang berusia 10-14 tahun mencapai 6,34 persen. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) pada 2001 memperkirakan anak-anak pada rentang usia yang sama baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari kerja mencapai 9,2 persen. Pengumpulan data lain untuk Sakernas 1999 yang tidak dipublikasikan mencatat angka 6,9 persen. (Sebelum 1998, Sakernas merumuskan pekerja adalah mereka yang bekerja mulai usia 10 tahun. Karena itu, sejak 1998, Sakernas tidak mengelompokkan secara khusus pekerja anak di bawah 15 tahun, dan akibatnya tidak ada data yang menyebut secara khusus pekerja anak berusia 10-14 tahun). Data Sakernas 1999 maupun 2001 sama-sama dipakai, tapi paper ini lebih memilih Sakernas 1999 karena jumlah sampelnya lebih besar.

3 Sakernas 1999

4 Makalah ILO/IPEC, *The Economic Crisis and Child Labour in Indonesia*, Chris Manning, 2000, hal. 10

5 Makalah ILO/IPEC, *The Economic Crisis and Child Labour in Indonesia*, Chris Manning, 2000, hal. 23

pekerja anak, terutama yang masuk dalam jenis-jenis pekerjaan terburuk. Keputusan Presiden No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (NAP-WFCL) menyebutkan 13 bentuk pekerjaan terburuk untuk pekerja anak. Program ini telah menetapkan lima dari 13 jenis pekerjaan terburuk itu sebagai prioritas dalam lima tahun pertama pelaksanaan program tersebut yang direncanakan berlangsung selama 20 tahun ini. Kelima bentuk pekerjaan terburuk itu adalah anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba, anak-anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pelacur dan anak-anak yang bekerja di penangkapan ikan lepas pantai, pertambangan dan pembuatan alas kaki.

**13 Bentuk Pekerjaan Terburuk dari Pekerja Anak
Keputusan Presiden No. 59/2002**

- Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur;
- Mempekerjakan anak-anak di pertambangan;
- Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
- Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
- Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal);
- Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
- Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
- Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
- Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
- Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (cottage industries);
- Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;
- Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan;
- Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Secara umum, untuk mendapatkan data yang sah tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pekerja anak bukanlah hal yang mudah karena sifatnya yang terselubung, mobilitasnya yang tinggi dan keterbatasan akses. Namun demikian, ada satu upaya yang dilakukan untuk menghitung jumlah anak-anak dalam delapan sektor, yang berkaitan dengan bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak yang disebutkan dalam NAP-WFCL (Lihat Tabel 1). Angka-angka pada Tabel 1 tidak menunjukkan jumlah anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk dalam pengertian mutlak;

namun demikian, angka-angka tersebut menunjukkan jumlah anak-anak yang bekerja di berbagai sektor yang sangat berbahaya. Sebanyak 4.201.425 anak-anak berusia di bawah 18 tahun terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, dan lebih dari 1,5 juta diantaranya adalah perempuan.

Ada semacam kekhawatiran yang kian hari makin menyedot perhatian kita, yakni begitu besarnya jumlah anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba, seperti yang terlihat dalam beberapa studi terakhir. Menurut Kantor Wilayah Departemen Pendidikan DKI Jakarta (2000), 14% dari 1.603 SMP dan 16,13% dari 1.029 SMU di Jakarta melaporkan masalah narkoba di kalangan siswa mereka. Informasi yang dikumpulkan dari para pengguna narkoba menunjukkan bahwa 10-20% anak-anak yang menggunakan narkoba adalah mereka yang terlibat dalam penjualan narkoba, untuk menjaga kebiasaan mereka dan karena berbagai alasan lain.⁶

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius

Anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba

Risiko pertama yang dihadapi seorang anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba menyangkut aspek legal dari tindakan mereka. Ada argumentasi bahwa anak-anak cenderung diperalat sebagai pengedar narkoba karena mereka merasa tidak ada yang salah dalam perbuatan itu, dan mereka juga tidak menyadari dampak perbuatan mereka. Celakanya, jika mereka ditangkap polisi, anak-anak tersebut tidak hanya akan menghadapi hukuman berat dari penegak hukum, tapi juga dari orang-orang yang mengendalikan mereka. Di samping itu, risiko-risiko yang mereka hadapi lebih dari sekedar hukuman. Risiko itu antara lain terampasnya kesempatan anak-anak itu mendapatkan pendidikan karena mereka dipaksa keluar dari sekolah.⁷ Penggunaan narkoba juga merusak perkembangan fisik mereka. Perlu juga disebutkan di sini bahwa narkoba biasanya tidak hanya digunakan secara sukarela, tapi dalam beberapa kasus, juga dengan cara pemaksaan. Narkoba dapat digunakan untuk menguasai anak-anak dan menjadikan rawan terhadap jenis-jenis pekerjaan yang bersifat eksploitatif, seperti eksploitasi seks komersial.

5

Akibat dan penderitaan yang harus dihadapi anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi seks komersial juga tidak kalah seriusnya. Beberapa studi memperlihatkan bahwa kenaikan perdagangan

Eksploitasi seks komersial pada anak-anak

6 'Children involve in sale, production, and trafficking of drugs, in Jakarta', a Rapid Assesment, Irawanto Phd dan Riza Sarasvita, 2003.

7 Berdasarkan penilaian yang cepat tadi, sebagian besar yang diwawancarai menunjukkan mereka menjual narkoba ketika mereka sedang bersekolah, terutama ketika mereka berada di SMP atau SMA (hal.6)

remaja untuk dijadikan pelacur cukup signifikan sebagai pemicu migrasi (antarnegara dan domestik) serta perdagangan tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 1999 yang diperoleh dari Departemen Sosial, ada sekitar 70.000 anak yang terjerumus menjadi pekerja seks (ILO/IPEC, 2001b:9). Angka tersebut cocok dengan pernyataan Farid bahwa 30 persen pekerja seks berusia di bawah 18 tahun (Irwanto, dkk., 2001:30).⁸ Menjamurnya jasa hiburan yang beraneka ragam memberikan peluang bagi berbagai bentuk pekerjaan seks yang beraneka ragam. Kompleks hiburan, panti pijat, bar, karaoke, gadis-gadis yang mempromosikan bir, para penjual minuman ringan dan teh, dan sebagainya memungkinkan terjadi eksploitasi seksual komersial.

Bentuk-bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi pekerja anak

Jenis pekerjaan yang membahayakan anak-anak seperti penangkapan ikan di sektor lepas pantai, pertambangan dan pembuatan alas kaki memerlukan penanganan segera. Enam macam bahaya seperti kecelakaan, bahaya kimia, fisik, ergonomis, psikososial dan biologi akan mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai bentuknya. Misalnya, penggunaan air raksa di pertambangan, dan perekat yang mengandung pelarut organik beracun seperti toluena, methyl ethyl keton, dan aseton pada pekerjaan pembuatan alas kaki informal dapat menimbulkan kerusakan otak atau kerusakan sistem saraf pusat. Peralatan dan perkakas yang digunakan anak-anak seringkali dibuat untuk memenuhi persyaratan pekerja dewasa, dan tidak memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang secara fisik belum sepenuhnya berkembang. Dalam skenario terburuk, bahaya-bahaya semacam ini bisa merenggut nyawa seorang anak/atau menyebabkan kerusakan permanen pada diri anak. Suatu kecelakaan parah yang terjadi di Kalimantan Timur pada tahun 1998 telah merenggut nyawa 32 orang pekerja, dan separuh dari korban tersebut adalah anak-anak.

Pekerja anak di rumah tangga

Anak-anak yang potensial menghadapi lingkungan kerja yang berbahaya, tapi belum mendapat perhatian adalah anak-anak yang bekerja di rumah tangga. Menurut survai dasar pertama pada tahun 2002/2003 yang dilakukan oleh

⁸ Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, ICMC and Solidarity Center, USAID, 2003, hal. 68

Universitas Indonesia dan ILO-IPEC, ada sekitar 688.132 anak-anak yang menjadi pekerja rumah tangga di Indonesia. Sangatlah sulit menentukan jumlah pekerja rumah tangga anak-anak atau untuk menggeneralisasi kondisi kerja mereka karena situasi kerja yang mungkin dihadapi oleh anak-anak tersebut sangat beragam tergantung pada majikannya. Namun demikian, tidak ada seorangpun yang bisa meniadakan risiko yang harus dihadapi oleh pekerja anak-anak di rumah tangga di balik pintu tertutup tanpa adanya dukungan dari luar. Anak-anak itu seringkali berada dalam pengawasan penuh para majikan mereka, sehingga hal semacam ini seringkali dipandang "mirip perbudakan". Seringkali, para pekerja anak-anak di rumah tangga menghadapi siksaan fisik, siksaan seksual dan emosional. Namun demikian, mereka cenderung menyembunyikan keadaan yang sebenarnya karena takut kehilangan pekerjaan. Meskipun masalahnya cukup serius, pekerja anak-anak di rumah tangga sampai saat ini belum mendapat perhatian yang memadai dan belum dimasukkan ke dalam sektor-sektor yang diprioritaskan pada fase pertama Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak (RAN-PBTPA)

Dalam tiga dasawarsa terakhir, setelah tahun 1965, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mantap kecuali selama krisis ekonomi pada kuartal ke-4 tahun 1997 dan 1998⁹. Menurut laporan dari ILO/IPEC, perkembangan ekonomi makro Indonesia selama dua puluh tahun terakhir (1976 sampai 1996) memperlihatkan hubungan yang unik dengan kemiskinan pekerja anak. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan nasional bisa diturunkan menjadi hanya seperlima dari tahun 1970-an (berkurang sebanyak 81%), tapi penurunan kemiskinan di kalangan pekerja anak hanya 42 persen (lihat Lampiran 2).¹⁰

Pertumbuhan ekonomi yang memihak kaum miskin dan pekerja anak

Orang mungkin bertanya-tanya mengapa penurunan angka kemiskinan tidak sertamerta menurunkan kemiskinan pada pekerja anak.

9 Tingkat kemiskinan turun dari 40,1 persen pada 1976 menjadi 11,3 persen (1996), tapi krisis ekonomi mengembalikan Indonesia ke tahun 1981 dan 1984. Pada tahun 2002, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 17,9 persen (Indonesian-interim PRSP, hal. 3).

10 Makalah Kerja ILO tentang Pekerja Anak di Indonesia, Unger dan Irawan, hal. 5, 2002, ILO Jakarta.

Jawabannya barangkali adalah pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung memberikan efek yang sama pada pertumbuhan ekonomi kaum miskin, sehingga hal itu tidak bisa diterjemahkan menjadi pengentasan kemiskinan di kalangan orang miskin. Karenanya, tidak berarti hal itu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan pekerja anak. Pendapat ini semakin diperkuat oleh tren pada koefisien Gini yang memperlihatkan semakin buruknya ketidakmerataan pendapatan dari tahun 1964 (0,333) ke tahun 1996 (0,356). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin, pertumbuhan ekonomi tidak akan menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih baik, sehingga rumah-tangga miskin tetap saja miskin dan rawan terhadap persoalan pekerja anak.

Ini semakin memperjelas arti penting pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada kaum miskin untuk mengatasi masalah pekerja anak. Gerakan dan arah strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti yang disebut dalam UU. 25/2000 tentang Proenas (Program Pembangunan Nasional Lima Tahunan) 2000-2004 dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Sementara (*Interim-PRSP*) pada 2002 menempatkan dampak terhadap rumah tangga miskin dan membantu pertumbuhan ekonomi yang memihak kaum miskin sebagai sasaran. I-PRSP menyoroti pengentasan kemiskinan di luar "pertumbuhan ekonomi makro" dan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, karena ia haruslah seiring sejalan dengan upaya mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin.¹¹ Karena kita percaya bahwa pengentasan kemiskinan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin akan sangat membantu dalam mengurangi pekerja anak, upaya-upaya untuk menghapus pekerja anak senantiasa berjalan seiring dengan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin. Dengan demikian, upaya-upaya ke arah penghapusan pekerja anak dapat dianggap sebagai kontribusi langsung untuk pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin.

11 Indonesian Interim-Poverty Reduction Strategy paper (I-PRSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2002, hal. 7.

Empat tujuan strategis program pengentasan kemiskinan telah ditetapkan dalam *Interim-PRSP*: (i) menciptakan peluang kerja untuk orang miskin; (ii) pemberdayaan masyarakat; (iii) pengembangan kemampuan; dan (iv) perlindungan/jaminan sosial. Dalam kerangka kerja yang telah disusun untuk pengentasan kemiskinan, kontribusi atas penghapusan pekerja anak yang bisa berujung kepada pengentasan kemiskinan memiliki fungsi ganda.

Kontribusi pengentasan kemiskinan

I-PRSP memberi perhatian yang lebih besar pada aspek pengembangan sumber daya manusia dalam upaya mengentaskan kemiskinan sebagai jawaban untuk tujuan strategis ketiga - pengembangan kemampuan. Karena itu, program pendidikan wajib sembilan tahun mendapat prioritas paling tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia. Tak pelak lagi, anak-anak yang tidak punya pilihan lain selain bekerja, memiliki waktu dan kesempatan terbatas untuk belajar. Karena mereka semakin dijauhkan dari peluang untuk memperoleh pendidikan pada tahap awal kehidupan mereka, kita tidak bisa berharap bahwa pekerja anak-anak dengan pencapaian pendidikan yang rendah akan tumbuh menjadi pekerja yang produktif yang bisa menikmati manfaat melebihi tingkat subsistensi mereka. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1999 memperlihatkan bahwa sekitar 72,01% rumah tangga miskin di daerah pedesaan dikepalai oleh mereka yang tidak tamat sekolah dasar, dan 24,3% dikepalai oleh lulusan SD.¹²

Pengembangan sumber daya manusia

Di samping itu, beberapa studi menyebutkan bahwa pencapaian pendidikan yang lebih rendah di kalangan kepala keluarga terbukti berkaitan erat dengan kemiskinan dalam hal memaksa orang untuk menempatkan prioritas pada kebutuhan jangka pendek seperti makanan dan tempat tinggal, di atas kebutuhan strategis jangka panjang seperti pendidikan. Kemiskinan di tingkat rumah tangga memaksa anak-anak untuk bekerja dan menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pekerja anak di rumah tangga miskin cenderung menciptakan generasi pekerja berikutnya dengan kemampuan terbatas

dan ini melanggengkan siklus kemiskinan. Upaya memperbaiki tingkat pendidikan kepala keluarga dan menggalakkan pendidikan merupakan kunci untuk memutus lingkaran setan kemiskinan antar generasi serta mencegah menjamurnya pekerja anak.

Pencapaian pendidikan yang lebih rendah tidak hanya menghambat pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga mengurangi kemampuan nasional dalam mengurangi kemiskinan karena kondisi itu menyebabkan produktivitas turun dan kondisi itu menghasilkan tenaga kerja tidak terampil. Orang bisa saja berargumentasi bahwa anak-anak, karena memasuki dunia kerja pada usia lebih dini, nantinya bisa memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Namun demikian, keterampilan yang didapat oleh anak-anak dari pekerjaan mereka seringkali bersifat elementer (tidak mendalam). Dengan teknologi modern yang semakin meningkat, tingkat kemampuan dan keterampilan para pekerja diharapkan makin tinggi dan canggih. Kesenjangan pendidikan pada level sekolah menengah pertama (SMP) antara Indonesia dengan negara-negara tetangga (lihat lampiran 3) menjadi masalah besar bagi kinerja perekonomian perekonomian Indonesia di masa depan. Karena itu, penting untuk terus menggalakkan pendidikan wajib sembilan tahun sehingga produktivitas dan kemampuan pekerja bisa ditingkatkan.

Meskipun Indonesia menikmati keberhasilan dalam hal pencapaian pendidikan secara keseluruhan¹³, namun tantangan tetap saja menghadang mereka yang hidup dalam jerat kemiskinan: etnis minoritas dan kaum miskin, terutama perempuan. Bagi kaum miskin, biaya untuk mengirim anak ke sekolah begitu tinggi baik dari segi biaya untuk sekolah ataupun hilangnya pendapatan yang bisa dipakai untuk keperluan lain. Suatu studi memperlihatkan bahwa setelah krisis ekonomi, penurunan jumlah anak-anak yang tidak bersekolah begitu besar terutama pada 40% penduduk yang memiliki tingkat belanja terendah. Kondisi ini makin memperkuat kesimpulan bahwa turunnya jumlah anak sekolah, sebagian terkait dengan kemampuan

¹³ Berdasarkan statistik nasional, pekerja berpendidikan di bawah SD pada tahun 1971 mencapai 74 persen dari total pekerja. Sekarang angkanya sudah mendekati 25 persen.

membayar biaya sekolah di kalangan kelompok masyarakat yang miskin.¹⁴ Untuk pekerja anak, yang secara alami cenderung gagal memanfaatkan kesempatan mendapatkan dan meningkatkan pendidikan dan juga yang mengharapkan efek dari pendidikan yang bersifat segera ketimbang mereka yang tidak membutuhkan pekerjaan, diperlukan respon yang luas untuk meningkatkan efek (*returns*) dari pendidikan dan untuk mengarahkan anak-anak menjadi pekerja produktif.

Walaupun penekanan sudah ditetapkan pada pencapaian pendidikan wajib sembilan tahun bagi semua orang dan sosialisasi pendidikan yang berkesinambungan, harus pula dicatat bahwa pendidikan dasar memiliki ruang lingkup terbatas dalam mengarahkan anak-anak ke pekerjaan yang mendatangkan hasil lumayan secepatnya dan mendatangkan keuntungan yang cepat yang nantinya akan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Agar anak-anak di atas usia minimum bekerja (15 tahun) bisa mendapatkan pekerjaan yang mendatangkan hasil lumayan perlu dilakukan upaya peningkatan pekerjaan kaum muda¹⁵ melalui pengembangan pelatihan keterampilan dan kejuruan.

Pekerjaan kaum muda (lihat juga paparan teknis singkat tentang pekerjaan kaum muda)

Seperti yang terlihat pada tabel (Lampiran 1), jumlah anak-anak yang berusia 15-17 yang berpeluang bekerja di beberapa jenis pekerjaan yang berbahaya cukup besar. Karena itu, dari sudut pandang pencegahan pekerja anak, penciptaan lapangan kerja cukup efektif untuk mencegah anak-anak tersebut memasuki pekerjaan yang berbahaya dengan cara mempersiapkan mereka sebagai pekerja produktif serta memberikan perlindungan dan keterampilan yang sesuai. Tanpa adanya pemahaman yang memadai tentang pasar kerja dan pilihan pekerjaan, maka para remaja akan menjadi sangat rawan terhadap eksploitasi sosial dan fisik.

Dari sudut pandang pengentasan kemiskinan, pekerjaan bagi kaum remaja sangat penting, karena ia menjadi penghubung antara pekerja anak dengan tenaga kerja nasional dalam spektrum pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan

14 Keadaan dan Perkembangan Pendidikan Setahun Setelah Krisis, Boediono, Suryadi, dan Heriawan, 1999, hal. 38

15 kategori Muda didefinisikan dalam MDGs sebagai orang yang berusia 15-24 tahun.

kejuruan dan keterampilan yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut (di atas 15 tahun) harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Khusus bagi pekerja anak-anak dan orangtua mereka, nilai pendidikan dan pelatihan ditentukan *vis-à-vis* dengan kelayakan kerja dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Dengan demikian, ILO-IPEC sejauh ini telah memberikan pelatihan keterampilan praktis dan kesempatan magang untuk anak-anak yang lebih tua yang berusia antara 15-17 dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi wirausahawan dan/atau kelayakan kerja di sektor-sektor formal.

Tindakan-tindakan untuk menghapus pekerja anak di Indonesia

Seperti tampak pada analisis di atas, hubungan antara pekerja anak dengan kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks. ILO melalui Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (*the International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) terus mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat madani untuk mengatasi dimensi kemiskinan yang kompleks pada pekerja anak dengan memberikan respon multidimensi sejak tahun 1992. Dukungan ILO-IPEC bersifat holistik dengan aktivitas bertingkat yang langsung ditargetkan pada penerima manfaat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan Pekerja Anak.

Advokasi kebijakan dan peningkatan kesadaran

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan berarti dalam mengubah kebijakan-kebijakan dan meningkatkan kesadaran tentang pekerja anak dengan dukungan dari masyarakat madani dan ILO-IPEC. Pengesahan Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 dan Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk dari Pekerja Anak No. 182 merupakan contoh konkrit dari prestasi tersebut. Kedua konvensi tersebut tidak saja telah memberikan landasan yang kokoh bagi upaya-upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia, tapi juga dukungan bagi perencanaan Rencana Aksi Nasional untuk Mengatasi Bentuk-bentuk terburuk untuk Pekerja Anak dalam kurun waktu 20 tahun.

Komitmen yang dibuat oleh Pemerintah telah menghasilkan dampak ganda dengan memasukkan

masalah pekerja anak ke dalam program-program pemerintah yang ada sekarang ini. Komponen pekerja anak diintegrasikan ke dalam program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, yang bertujuan mendukung kamu miskin pedesaan melalui pembiayaan ekonomi mikro dan aktivitas yang menghasikan pendapatan. Departemen Dalam Negeri bersama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Pedesaan telah melaksanakan program untuk mendukung anak-anak dari keluarga sasaran untuk melanjutkan pendidikan dengan cara memberikan beasiswa. Masyarakat dan keluarga didorong oleh penyuluh yang dilatih khusus, untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah dan bukannya ke tempat kerja. Model seperti ini dianggap berhasil dan dijiplak untuk digunakan di provinsi lain.

Pekerja anak juga dimasukkan ke dalam program kerja Departemen Pendidikan Nasional. ILO-IPEC mendukung pengaturan kembali program pendidikan non-formal yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang bekerja dengan cara mengadaptasi metodologi pengajaran dan meningkatkan akses anak-anak yang bekerja terhadap program ini. Kegiatan semacam ini sudah lama berusaha mempengaruhi Direktorat Pendidikan Masyarakat untuk mengakui adanya masalah pekerja anak dan memikirkan kembali peran pendidikan nonformal dalam mendukung upaya-upaya penghapusan pekerja anak. Dengan mempertimbangkan jumlah dan potensi dalam pencapaian pendidikan pekerja anak di rumah tangga, kelompok anak-anak ini dijadikan sasaran strategis untuk pencapaian 100% pendidikan wajib sembilan tahun di Indonesia.

Sejak Januari 2001, pemerintah daerah di Indonesia memasuki era otonomi yang baru, yang memungkinkan mereka menyusun anggaran dan rencana pembangunan daerah. Sekarang ini, setiap wilayah diharapkan merumuskan Strategi Pengentasan Kemiskinan mereka masing-masing setelah rampungnya Program Strategi Pengentasan Kemiskinan (PRSP) tingkat nasional. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi semakin penting. Pemerintah daerah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengenali

**Desentralisasi
inisiatif
penghapusan
pekerja anak**

permasalahan yang sesungguhnya di masyarakat akar rumput dan menjawab kebutuhan mereka. Jadi, untuk memobilisasi masyarakat agar dapat memerangi pekerja anak di tingkat akar rumput, ILO-IPEC mendukung fungsi komite aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak. Komite tersebut berfungsi sebagai wahana untuk bekerja secara efektif dan untuk mengarusutamakan pekerja anak ke dalam rencana pembangunan tingkat provinsi dan tingkat daerah.

Salah satu contoh positif dari pendekatan ini adalah pencanangan "Daerah Bebas Pekerja Anak" oleh Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pada bulan April 2002 Bupati Kutai Kertanegara membahas rencana memerangi pekerja anak di kabupaten tersebut dengan ILO-IPEC. Pemerintah Kabupaten menyadari bahwa penanganan pekerja anak merupakan satu unsur dari upaya yang lebih luas melawan kemiskinan dan untuk memajukan ekonomi dan pembangunan daerah.

Proyek perikanan yang dibentuk oleh ILO-IPEC di Sumatera Utara merupakan contoh lain dari upaya terdesentralisasi untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak. Pemerintah provinsi Sumatera Utara, yang merupakan aktor utama dari proyek tersebut, mengambil inisiatif untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak dengan cara membentuk komite aksi provinsi berdasarkan peraturan daerah provinsi tanggal 7 Oktober 2002. Pemerintah provinsi juga telah menetapkan peraturan daerah untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak di provinsi tersebut, yang diharapkan bisa diadopsi sebelum bulan Februari 2004.

14 **Intervensi sektor yang spesifik**

Intervensi sektor yang spesifik yang didukung ILO-IPEC di di sektor penangkapan ikan (jermal) di Sumatera dan pembuatan alas kaki di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat pada bulan Desember 1995, telah mulai membuahkan hasil dalam empat tahun terakhir ini. Menjelang akhir bulan Juni 2003, sebanyak 295 anak-anak telah ditarik dari jermal dan 1.354 anak-anak telah dilarang bekerja di jermal melalui intervensi berupa proyek pengadaan

pendidikan nonformal, pelatihan kerja, program magang, program peningkatan kehidupan, dan skim pembiayaan mikro. Di sektor industri alas kaki tercatat ada 603 pekerja anak yang berhasil ditarik keluar dari industri yang berbahaya tersebut dan 3.015 anak lagi berhasil dicegah masuk ke industri seperti itu. Lebih dari 1.700 anggota keluarga yang sudah dewasa juga memperoleh manfaat dari proyek seperti itu.

Selain adanya komitmen dari pemerintah daerah, proyek tersebut juga didukung oleh organisasi pekerja dan organisasi pengusaha di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. SPTSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit) secara aktif membantu dalam kaitannya dengan masalah pekerja anak dan mendukung dibentuknya Asosiasi Tukang (Asosiasi Tukang Cibaduyut, ASPEC). Para pengusaha juga ikut serta mendukung proyek tersebut dengan membentuk Asosiasi Pengusaha Pembuatan Alas Kaki Skala Kecil Cibaduyut (ASPC) yang tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan para pengusaha pembuatan alas kaki informal melalui pengembangan jaringan dan pasar serta pelatihan pengembangan usaha.

Proyek-proyek tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan solusi yang berkesinambungan dan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok sasaran. Salah satu solusi yang realitis adalah dengan memperbaiki kondisi kerja pekerja anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas. Komponen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK) dalam proyek yang berkaitan dengan alas kaki telah pula mendukung pengembangan kemampuan para pengusaha dan pekerja untuk mengakui dan membahas masalah-masalah KKK dan untuk memperbaiki kondisi kerja melalui upaya-upaya berbiaya rendah.

Rencana aksi nasional Indonesia untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk pekerja anak (RAN-PBTPA)

Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pekerja Anak (PBTPA) yang akan berlangsung 20 tahun.¹⁶ Tujuan dari Fase Pertama RAN-PBTPA pada tahun 2003-2007 adalah (i) meningkatkan kesadaran publik, (ii) memetakan keberadaan PBTPA, dan (iii) menghapus lima jenis pekerjaan yang terburuk bagi pekerja anak, terutama anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba, perdagangan anak-anak untuk dijadikan pelacur dan anak-anak yang bekerja di penangkapan ikan di lepas pantai, tambang, dan pabrik alas kaki. ILO-IPEC, berdasarkan pengalaman yang didapat dari berbagai kegiatannya sejak tahun 1992, mendukung RAN-PBTPA Indonesia melalui Program Terikat Waktu (*Time-Bound Programme/TBP*) (lihat Lampiran 4). Berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan oleh RAN-PBTPA, program pendukung senilai US\$ 4 juta ini dimaksudkan untuk menarik dan mencegah sejumlah 31.450 anak bekerja di lima sektor tersebut, dan mendukung pemberdayaan ekonomi 7.000 keluarga. Ini juga akan memberi kontribusi terhadap rencana nasional untuk penghapusan pekerja anak secara menyeluruh sebelum tahun 2022 dalam dua sektor (perdagangan anak-anak untuk dilacurkan; penjualan, produksi dan perdagangan narkoba) di wilayah-wilayah yang telah ditentukan.

TBP akan menggunakan strategi yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama strategi ini akan difokuskan pada upaya melakukan perubahan kebijakan dan lingkungan yang kondusif. Bagian ini juga mencakup sosialisasi aksi menentang pekerja anak dalam kerangka kebijakan dan program nasional dan daerah, memperbaiki pengetahuan, memperbaiki lingkungan hukum, meningkatkan kesadaran dan melakukan pendampingan, dan mengembangkan kemampuan para pihak yang berkepentingan. Melalui pekerjaan ini, proyek tersebut diharapkan bisa membantu kemajuan upaya nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak secara kualitatif. Pekerjaan ini juga diharapkan bisa membantu meningkatkan komitmen sumberdaya lain dari badan nasional dan internasional lainnya, dalam

16 Keputusan Presiden 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

upaya mengembangkan dukungan kepada NPA-WFCL Indonesia.

Baik analisis hubungan antara pekerja anak dan kemiskinan maupun pengalaman ILO-IPEC semakin mempertegas bahwa pekerja anak dan kemiskinan adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pekerja anak merupakan manifestasi dari kemiskinan dan sekaligus juga merupakan penyebab kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, pekerja anak harus dianalisis dan diartikulasikan dalam setiap proses PRSP Indonesia, terutama penilaian kemiskinan partisipatif, pengkajian kebijakan/program dan perumusan strategi. Selain itu, ILO juga merekomendasikan dimasukkannya pekerja anak (anak-anak berusia 10 sampai 14 tahun dalam ketenagakerjaan) sebagai salah satu indikator dalam indikator kinerja pengentasan kemiskinan dalam PRSP, bersama dengan tingkat bekerja tenaga kerja muda (berusia 15-17 dan 18-24) yang diperlukan untuk Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*). Sebagaimana dibahas sebelumnya, prevalensi pekerja anak sangat erat kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada kaum miskin. Meskipun PRSP dimaksudkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan dengan cara mengintensifkan upaya ke arah pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada kaum miskin, indikator pekerja anak yang dapat mengukur dampak pengentasan kemiskinan untuk kaum miskin di tingkat rumah tangga harus diperkenalkan.

Indikator pekerja anak

Aspek penting lain yang berkaitan dengan indikator pekerja anak adalah bahwa indikator tersebut dianggap sebagai kontra indikator dari indikator pendidikan seperti tingkat partisipasi sekolah, tingkat kehadiran dan proporsi anak sekolah yang bergerak dari level (*grade*) satu hingga lima. Walaupun indikator-indikator pendidikan menunjukkan perkembangan positif ke arah pengembangan sumber daya manusia, indikator pekerja anak memperlihatkan adanya beberapa variabel yang menghalangi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Berbagai variabel yang dapat secara langsung digambarkan oleh prevalensi pekerja anak adalah mutu,

kemudahan akses, keterjangkauan, relevansi pendidikan dengan masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta sikap orangtua terhadap pendidikan anak-anak mereka. Variabel-variabel ini secara terpisah bisa memainkan peran penting dalam menentukan kesempatan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan dan/atau memasuki dunia kerja. Dengan mengukur kemajuan positif dan negatif dari pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan dasar kemampuan nasional dalam memerangi kemiskinan, kinerja pengentasan kemiskinan akan bisa dinilai.

Usulan angka dasar

Akhirnya, perlu juga ditekankan di sini bahwa biaya usulan indikator cukup kompetitif. Sampai tahun 1997, Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) mendefinisikan tenaga kerja dari anak-anak yang berusia 10 tahun keatas, dan data dikumpulkan secara teratur. Pada tahun 1998, batasan usia tenaga kerja direvisi menjadi 15 tahun karena argumen bahwa pekerja di bawah batasan usia minimum tidak diakui oleh definisi yang ada sekarang.¹⁷ Melihat kondisi riil yang dihadapi anak-anak berusia di bawah 15 tahun dalam dunia kerja, tampaknya masuk akal untuk memasukkan anak-anak usia 10 tahun ke atas dalam survei tenaga kerja sebagaimana sebelumnya.¹⁸

Dengan merevisi batasan usia tenaga kerja, data pekerja anak berusia 10-14 dan 15-17 bisa diperoleh dengan mudah dan secara teratur tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk SAKERNAS. Lebih jauh, data historis juga tersedia, yang bisa memberikan kontribusi dalam penetapan angka yang menjadi target dan proyeksi kecenderungannya di masa datang. Adapun angka paling mutakhir tentang jumlah pekerja anak-anak berusia 10-14 yang diperoleh dari SAKERNAS (2001) yang bisa digunakan sebagai angka dasar adalah 6,34%.

17 Meskipun demikian, Sakernas tetap mengumpulkan data mengenai anak-anak berusia 10-14 tahun dalam sebagai bagian dari tenaga kerja. Tapi, angka ini tidak pernah dipublikasikan sejak tahun 1998.

18 Data resmi mengenai pekerja anak

Lampiran 1

Keterlibatan dan potensi terjerumus ke dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang mempekerjakan pekerja anak

Sektor	Usia 10-14	Usia 15-17
Pelacuran	tidak ada data	27.000
Perdagangan narkoba	tidak ada data	(Minimum)100.000
Pertanian	912.677	1.702.805
Pertambangan	16.182	28.444
Pekerjaan rumah tangga	tidak ada data	310.000
Perikanan	31.172	106.383
Konstruksi	6.912	94.623
Manufaktur	209.943	655.311
Total	1.176.886	3.024.566

Sumber: Unger dan Irawan, Kertas Kerja ILO tentang Pekerja Anak di Indonesia, 2002, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk tahun 1999 perkiraan optimis tentang pelacuran dan perdagangan narkoba)

Lampiran 2

Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dan pekerja anak, 1976-1996 dan 1997-2000 (%)

Tahun	Orang yang hidup dalam kemiskinan		Anak-anak berusia 10-14		
	% jumlah	Angka (juta)	Jumlah anak-anak (juta)	Yang ada dalam pasar kerja	
				jumlah anak-anak pada pasar kerja	% kelompok umur
1976	40.10	54.2	15.1	2.10	13.00
1980	28.00	42.3	17.6	1.98	11.27
1986	21.60	35.0	21.0	2.72	12.94
1990	15.10	27.2	21.5	2.24	10.41
1996	11.30	22.5	22.6	1.92	8.51
1998 Des.	24.20	49.5	21.7	1.79	7.91
1999 Feb.	23.50	48.4	-	-	-
1999 Agt.	18.20	37.5	20.9	1.52	6.86
2000 *	19.00	37.3	20.2	1.06	4.71

Lampiran 3

Tingkat Partisipasi di SMP

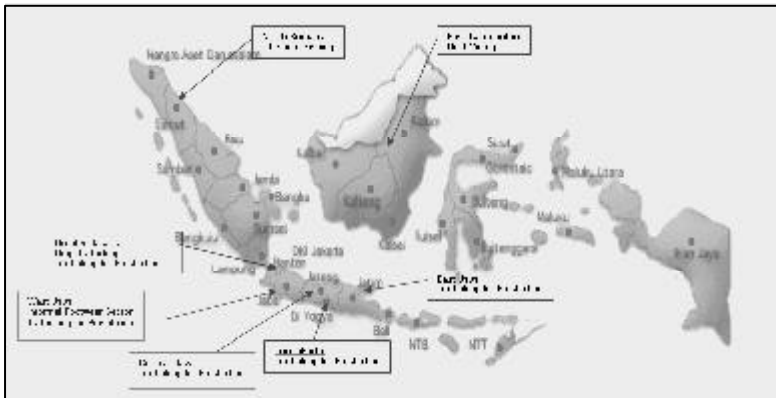
Negara	% tingkat pendaftaran
Malaysia	83 (1990)
Filipina	79 (1993)
Thailand	63 (1994)
Indonesia	47 (1995)

Sumber: Pendidikan di Indonesia, Bank Dunia, 1998

Lampiran 4

Cakupan Geografis TBP

Proyek ini menggabungkan upaya-upaya memperkuat lingkungan yang kondusif pada level nasional dengan target intervensi membantu anak-anak yang terlibat dalam enam sektor utama seperti tergambar pada peta di bawah ini. Daerah-daerah tersebut diidentifikasi untuk kepentingan intervensi yang didasarkan pada pemahaman mengenai situasi di daerah-daerah tersebut dalam informasi khusus yang dikumpulkan selama penilaian singkat (*rapid assesment*) yang baru saja dilakukan.



Target penghapusan bentuk pekerjaan terburuk pekerja anak di daerah yang dicakup TBP

Sektor	Perkiraan optimis # yang termasuk dalam WFCL di provinsi yang dicakup TBP	Target setelah 5 tahun	Target setelah 10 tahun	Target setelah 20 tahun
Perdagangan perempuan untuk dilacurkan: Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah	21,500	17,200	10,750	0
Penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba: Jakarta	15,000	14,000	10,000	0
Pertambangan: Kalimantan Timur	10,000	7,000	0	0
Pabrik Alas Kaki: Jawa Barat	9,000	1,000	0	0
Penangkapan ikan di laut dalam: Sumatra Utara	7,157	1,000	0	0